KEEFEKTIFAN PENYERAPAN ANGGARAN KEGIATAN PELATIHAN DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

KHARISMA
NIM. 07011381722152

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

KEEFEKTIFAN PENYERAPAN ANGGARAN KEGIATAN PELATIHAN DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

SKRIPSI

Oleh :
KHARISMA
07011381722152

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Agustus 2021

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
NIP. 195811191985031003

Pembimbing II

Dwi Mirani, S.I.P., M.Si
NIP. 198106082008122002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

KEEFEKTIFAN PENYERAPAN ANGGARAN KEGIATAN PELATIHAN DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 6 Januari 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
Ketua

Dwi Mirani, S.I.P., M.Si
Anggota

Dr. Nengyanti, M.Hum
Anggota

Dra. Martina M.Si
Anggota

Mengetahui,

Dekan FISIP

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP 198108272009121002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharisma

NIM : 07011381722152

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Keefektifan Penyerapan Anggaran Pelatihan Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain tentang karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 15 Januari 2022

Yang membuat pernyataan

Kharisma

NIM 07011381722152

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Jangan menganggap bahwa hidup adalah serangkaian kekalahan. Kita tak boleh jatuh, tak boleh tenggelam, dan sama sekali tak boleh terempas karena peristiwa ini. Kebenaran ada di tangan mereka yang memihak rakyat"

(Leila S. Chudori)

Atas Ridho Allah, Skripsi ini

Saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orangtuaku, Ayahanda Iskandar Barchia dan Ibunda Nur Aziza
2. Saudaraku, Keluargaku, Teman dekatku.
3. Teman-teman seperjuanganku Administrasi Publik Angkatan 2017
4. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **"KEEFEKTIFAN PENYERAPAN ANGGARAN KEGIATAN PELATIHAN DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019"**. Skripsi ini dibuat sebagai akhir dari rangkaian pembelajaran sekaligus sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Penuh rendah hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Serta Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Mardianto, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo, M.Si., MM. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dwi Mirani, S.I.P., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ketulusan hati serta selalu sabar dalam membimbing, mendukung dan mengarahkan dalam proses penelitian.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, jajaran staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama di bangku perkuliahan
7. Bapak Drs. H. Koimudin, S.H., MM. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan izin peneltian di dinas yang beliau pimpin.
8. Teman seperjuangan, Kintan Virinda Putri, Hera Ratnaningrum, M. Lutfi Baidowi, Justin Nurrahma, Jesica Anju Mareta, Desy Intan Hardiyanti, Yunita Rahmawati, Indira Dwi Wahyuni, yang telah memberikan *support* selama proses penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017, semoga kesuksesan serta keberhasilan menghampiri kita semua.
10. Seluruh pihak yang memberi dukungan dalam membantu selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih. Harapan penrliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan. Peneliti juga sangat terbuka dengan berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga seluruh bantuan mendapat balasan dari Allah SWT.

Palembang, Desember 2021

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat dengan tujuan mengamati mengenai keefektifan sebuah penyerapan anggaran dalam kegiatan pelatihan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019. Penelitian ini menggunakan Teori Pengukuran Efektivitas yang dikemukakan oleh Mahmudi menggunakan 3 aspek yaitu *input,output dan outcome*. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang diolah menggunakna analisis deskriptif. Data yang digunakan ialah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperoleh langsung dari Disnakertrans. Hasil penelitian menunjukkan keefektifan penyerapan anggaran Disnakertrans 2 aspek yakni input dan output dapat dikatakan efektif. Sedangkan pada aspek outcome, kurang efektif. Peneliti memberikan saran kepada Disnakertrans untuk memberikan pelatihan dengan dibantu teknologi yang diharapkan dapat memudahkan pengawasan pelatihan, mengajarkan peserta, meningkatkan kinerja aparatur, dan mengelola anggaran lebih baik lagi.

Kata Kunci: Keefektifan, Penyerapan Anggaran, Pelatihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM	**Dwi Mirani, S.I.P., M.Si**
NIP. 195811191985031003	**NIP. 198106082008122002**

Palembang, Desember 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This study was made with the aim of observing the effectiveness of budget absorption in ob training activites at the Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi of South Sumatera Province for Fiscal Year 2019. This study uses the effectiveness Measurement Theory proposed by Mahmudi using 3 aspects, input, output and outcome. The method used is a qualitative method which is processed using descriptive analysis. The data used is the Government Agency Performance Accountability Report obtained directly from Disnakertrans of South Sumatera Province.. The Result showed that the results of the absorption of the Manpower and Transmigration Office of South Sumatra Province of 2 aspects, namely input and output could be said to be effective. Meanwhile, in the outcome aspect it is less effective. researcher gives advice to the Manpower and Transmigration Office to provide training with the help of technology which is expected to facilitate supervision, teach participants, improve apparatus performance, and manage budgets better.

Keywords: Effectiveness, Budget Absorption, Job Training, Department of Manpower and Transmigration

Advisor I

Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
NIP. 195811191985031003

Advisor II

Dwi Mirani, S.I.P., M.Si
NIP. 198106082008122002

Palembang, December 2021
Head of the Departement of Public Administration
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Landasan Teori 9
B. Keuangan Negara 9
C. Efektivitas 11
D. Budaya Birokrasi 14
E. Anggaran 15
F. Pelatihan Kerja 19
G. Penelitian Terdahulu 19
H. Kerangka Pemikiran 24
BAB III METODE PENELITIAN 26
A. Jenis Penelitian 26
B. Definisi Konsep 26
C. Fokus Penelitian 27
D. Jenis dan Sumber Data 28
E. Informan Penelitian 30
F. Teknik Pengumpulan Data 30
G. Teknik Analisis Data 31

H. Sistematika Penulisan 32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 34
B. Keefektifan Penyerapan Anggaran Kegiatan Pelatihan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 50
1. Input 51
2. Output 69
3. Outcome 74
BAB V PENUTUP 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Hasil Kegiatan UPTD BLKPPKT Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 6
Tabel 2. Perbandingan Tingkat Efektivitas 14
Tabel 3. Penelitian Terdahulu..... 20
Tabel 4. Fokus Penelitian 28
Tabel 5. Komposisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan 45
Tabel 6 Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan . 52
Tabel 7.Jumlah ASN bidang Ketenagakerjaan..... 54
Tabel 8. Jumlah ASN UPTD 54
Tabel 9. Jumlah Gedung penunjang kegiatan pelatihan kerja 57
Tabel 10. Penempatan Kerja..... 65
Tabel 11. Anggaran kegiatan bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja 67
Tabel 12. Realisasi Anggaran Disnakertrans..... 70
Tabel 13. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Produktvitas Tenaga Kerja 71
Tabel 14. Realisasi anggaran Balai Latihan Kerja 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Cara Kerja Efektivitas..... 13
Gambar 2. Rumus Efektivitas menurut Mahmudi 2011: 170..... 14
Gambar 3. Skema Kerangka Pemikiran 25
Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan..... 39
Gambar 5. Struktur Organisasi UPTD BLKPPKT Provinsi Suamtera Selatan..... 48
Gambar 6. Sarana dan Kegiatan Pelatihan Kerja 60
Gambar 7. Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pelatihan Kerja 60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Didukung dengan data kependudukan (http://www.bps.go.id, diakses pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 11.22 WIB) Indonesia pada tahun 2019 yang menginjak angka 267 juta jiwa yang menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan pertama di Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki fokus untuk menyelesaikan permasalahan terutama di bidang ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2017 jumlah total penduduk Indonesia mencapai 261.890 juta jiwa sedangkan Tahun 2018 jumlah total penduduk Indonesia meningkat mencapai 265,015 juta jiwa. Serta pada Tahun 2019 jumlah total penduduk Indonesia mencapai 267,91 juta jiwa.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia tanpa diikuti dengan peningkatan jumlah lapangan kerja, dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dari tahun ke tahun. Badan Pusat Statistik juga mencatat jumlah angkatan kerja pada Februari 2017 sebanyak 131,55 juta jiwa dengan jumlah pengangguran sebesar 7,4 juta jiwa. Pada bulan Februari 2018 sebanyak 133,94 juta jiwa dengan jumlah pengangguran sebanyak 7 juta jiwa. Sedangkan Februari 2019 sebanyak 138,18 juta jiwa serta jumlah pengangguran di Indonesia berjumlah 6,82 juta jiwa. Data ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Pada sebuah organisasi, manusia ialah tenaga kerja utama yang diberikan prioritas. Manusia pada dasarnya memiliki kelebihan dalam mengelola dan mengolah banyak hal. Proses peningkatan kerja yang digantungkan pada manusia didukung pada

kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga manusia dapat dikatakan sebagai pengontrol dan pengawasan dan bekerja lebih keras dalam mengimplementasikan jasanya.

Pemerintahan mengupayakan penanggulangan pengangguran di Indonesia agar permasalahan perekonomian dapat terselesaikan, dalam menanggulangi pengangguran tersebut diperlukan juga sebuah cara agar daya tingkat kreatifitas masyarakat meningkat yang dapat digunakan sebagai daya saing pada saat pencarian kerja di Indonesia maupun luar negeri. Kementerian Sekretaris Negara mengatakan bahwa pemerintah sebagai bentuk perwujudannya dibuktikan dengan lahirnya program pembangunan yang memiliki berbagai tahapan mulai dari jangka pendek, menengah hingga jangka panjang. Sehingga terbitlah 5 program prioritas APBN 2020, yakni: 1) Prioritas pada Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2) Pembangunan Infrastruktur yang menjangkau sentra-sentra ekonomi dan distribusi untuk lapangan kerja baru; 3) Penyederhanaan kendala regulasi, diantaranya dengan membuat UU tentang Cipta Lapangan Kerja yang akan menjadi *Omnibus Law*; 4) Pemangkasan Birokrasi dengan meningkatkan kompetensi kerja dan penguatan fungsi kerja dengan memangkas *eselonering*; dan 5) Transformasi Ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam ke manufaktur dan industri. Pada poin pertama hingga ketiga terlihat sekali tujuan dari pembangunan di Indonesia sangat difokuskan menciptakan lapangan kerja yang didasarkan pada pelatihan. Pembangunan sendiri masuk pada bidang ekonomi dan sosial yang turut berperan penting di negara berkembang guna memajukan Negara saat ini. Penciptaan lapangan kerja menjadi unsur sebuah pembangunan, dan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting dalam dunia kerja.

Sebagai sarana untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia maka pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebagai penyambung program meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia agar bisa lebih bersaing dalam mencari kerja. Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan mencatat bahwa penduduk Sumatera Selatan

memiliki penduduk sebesar 847 juta jiwa. Disnakertrans juga mencatat jumlah pengangguran terbuka sebesar 61.449 juta jiwa. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Sumatera Selatan melalui Disnakertrans Provinsi Sumsel dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kreatifitas sebagai daya saing masyarakat dalam mencari kerja.

Menurut Fajar 2013: 100 mengatakan pelatihan adalah proses pembelajaran yang ditujukan kepada karyawan agar pelaksanaan pekerjaan memuaskan. Lalu menurut Hariandja 2002: 169, alasan diterapkannya pelatihan bagi karyawan adalah pegawai yang baru direkrut sering kali belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan, perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas karyawan, karyawan menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada.

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi, pelatihan kerja berbasis kompetensi berpacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Guna menjamin kualitas pelatihan kerja, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai standar balai latihan kerja yang termaktub pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Balai Latihan Kerja.

Menurut Wikipedia ensiklopedia bebas, Balai Latihan Kerja atau sering disebut dengan BLK adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapat keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidangnya masing-masing. UPTD Balai Latihan Kerja, Pengembangan Produktivitas Keterampilan Transmigrasi Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Serang di Bawah Naungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Direktorat

Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas berperan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia industri guna mengurangi tingkat pengangguran dan menciptakan industri kreatif agar mampu mandiri dan bersaing dalam dunia industri.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas melaksanakan fungsi salah satunya ialah melaksanakan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, namun pada pelatihan ini, berdasarkan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Disnakertrans untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja. Dalam peraturan tersebut, pelatihan kerja dilaksanakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Pada Renstra Disnakertrans data Tahun 2017 memperlihatkan Tingkat Pengangguran Terbuka yang cukup tinggi adalah Kota Palembang dan Kota Prabumulih dan terbatasnya lembaga pelatihan kerja juga merupakan.salah satu faktor penyebab belum optimalnya kualitas lulusan pelatihan kerja serta keahlian kerja.

Guna merealisasikan fungsinya, terlaksanalah reformasi pada bidang pengelolaan keuangan negara yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada penyusunan dan penetapan APBN/APBD yang terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 terdapat penegasan mengenai tujuan dan fungsi penganggaran penyusunan dan penetapan anggaran, integrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klarifikasi anggaran, penyatuan anggaran serta penggunaan pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Rincian belanja negara dan belanja daerah pada UU Nomor 17 Tahun 2003 seperti unit

organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanja harus mendapat persetujuan dari DPR/DPRD.

Anggaran menurut Hansen dan Mowen 2001: 714 merupakan bentuk kuantitatif dari suatu rencana, yang dinyatakan dalam istilah fisik atau keuangan atau keduanya, ketika digunakan untuk perencanaan, sebuah anggaran merupakan metode untuk menerjemahkan tujuan dan strategi dari suatu organisasi ke istilah operasional.

Belanja Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah pernyataan nomor 2 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terbagi menjadi dua kelompok belanja yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang langsung mempengaruhi adanya program atau kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung tidak berpengaruh pada adanya program atau kegiatan. Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang meliputi 1) Pendapatan Daerah; 2) Belanja Daerah; 3) Pembiayaan Daerah.

Menurut data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Penyerapan anggaran masih menjadi sebuah masalah yang kerap terjadi pada instansi pemerintah. Penyerapan anggaran sering kali disebabkan karena penyerapan tersebut sering terjadi keterlambatan dan penumpukan dari tahun ke tahun dikutip dari tempo.co menjelaskan pola penyerapan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga cenderung rendah dan berimbas pada proses pencairan dana dari kementerian keuangan yang rumit.

Tabel 1. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Hasil Kegiatan UPTD BLKPPKT Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019

KEGIATAN PELATIHAN	VOLUME KEGIATAN	PAGU DIPA (RP)	REALISASI (RP)	SISA(RP)	CAPAIAN (%)	
					KEUANGAN	FISIK
Pelaksanaan Sertifikasi Lulusan BLK	57 Paket	971.930.000	947.411.500	24.518.500	97,48	98,27
PBK Skill For Future	48 Orang	296.400.000	157.097.300	139.302.700	93,67	100
PBK Non Boarding	83 Paket	5.583.440.000	5.350.635.000	232.805.000	95,83	100
JUMLAH		**6.851.770.000**	**6.455.143.800**	**396.626.200**	**94,21**	**99,47**

Sumber: Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2019

Tabel 1 memperlihatkan data garis besar realisasi anggaran pada kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi tahun anggaran 2019. Anggaran tersebut didanai oleh pemerintah pusat oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pada poin nomor 1 mengenai pelaksanaan sertifikasi lulusan BLK didapatkan sisa anggaran sebesar Rp24.518.500 sehingga capaian persentase keuangannya memperoleh angka 97,48% dan capaian fisik memperoleh angka 98,27%. Selanjutnya pada poin nomor 2 PBK *Skill for Future* didapatkan sisa anggaran sebesar Rp139.302.700 sehingga capaian persentase keuangannya memperoleh angka 93,67 dan capaian fisiknya memperoleh angka fisik 100. Dan pada poin ketiga atau terakhir yaitu PBK *Non-Boarding* didapatkan sisa anggaran sebesar Rp232.805.000 sehingga capaian persentase keuangannya memperoleh angka 95,83% dan capaian fisik sebesar 100%. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel dinilai berhasil mengadakan kegiatan pelatihan dilihat berdasarkan masing-masing poin pada tabel di atas. Hal tersebut merupakan langkah baik dari Disnakertrans dan BLK. Pelatihan ketenagakerjaan merupakan sebuah bagian dari program penting dari disnakertrans untuk melahirkan tenaga kerja yang memiliki *skill* sesuai pada bidang masing-masing. Pentingnya pelatihan tersebut diharapkan mampu membuat calon pekerja bersaing di dunia kerja.

Pengangguran merupakan sebuah masalah serius dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Pengangguran sebagai indikator untuk mengukur sehat atau tidaknya perekonomian negara. Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah memiliki program pelatihan kerja yang didukung dari dana APBN, seiring dengan banyaknya jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan pelatihan kerja yang diselenggarakan Disnakertrans juga menjadi strategi dalam mewujudkan visi "Sumsel Maju ntuk Semua" misi 1 dalam mengurangi angka pengangguran terbuka, sehingga memerlukan penyerapan anggaran yang tinggi guna menyukseskan kegiatan pelatihan tersebut. Kegiatan pelatihan kerja sekiranya mampu meningkatkan keahlian masyarakat dalam bersaing di dunia kerja, sehingga kegiatan pelatihan ini perlu diteliti mengenai keefektifan penyerapan anggarannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi pada latar belakang tentang penyerapan anggaran kegiatan pelatihan, maka rumusan masalah adalah bagaimana keefektifan penyerapan anggaran kegiatan pelatihan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmgrasi Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang akan dicapai pada penulisan ilmiah ini adalah untuk mengetahui keefektifan penyerapan anggaran kegiatan pelatihan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulisan ilmiah ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi bagi ilmu keuangan negara terutama dalam keefektifan penyerapan anggaran. Sehingga dapat menjadi bahan acuan secara praktis untuk berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung bagi civitas akademik Jurusan Ilmu Administrasi Publik terutama pada konsentrasi keuangan negara dan fiskal dan Disnakertrans sebagai pihak penyelenggara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mendapatkan hasil serta memberikan masukan serta gambaran bagi pemerintah daerah guna merumuskan kebijakan ataupun membuat arahan serta strategi ke depan untuk meningkatkan tingkat penyerapan anggaran yang efektif. Terkhusus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, pada hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan serta evaluasi untuk perbaikan dinas kedepannya berupa cara penyerapan anggaran yang efektif oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahmat. 2003. *Pengertian Efektivitas*. Jakarta: Rineka Cipta

Ani, Sri Rahayu. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara

Beni, Pekei. 2016. *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi.* Jakarta: Taushia

Hariandja, Marihot Tua Effendi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Keban, T, Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik,Konsep, Teori dan Isu.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN

M Steers, Richard. 1986. *Efektivitas Organisasi.* Jakarta: Erlangga

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press, Yogyakarta

Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta: YKPN

Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogya

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Mowen & Hansen. 2001. *Manajemen Biaya.* Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suparmoko. 1994. *Keuangan Negara (dalam teori dan praktik).* Yogyakarta: BPFE

Internet

Wibowo Hadi, Gonti. 2019. Pengangguran di Sumsel Meningkat (https://www.medcom.id/nasional/daerah/3NOXvz3b-pengangguran-di-sumsel-meningkat) (*online*)

Www.bps.go.id/jumlah-penduduk-indonesia-2019(*online*)

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah